



TAK KUNJUNG ADA TITIK TEMU PENYELESAIAN

Ketujuh Kalinya Raperda Penyandang Disabilitas Ditagih

YOGYA (KR) - Ratusan warga dari berbagai elemen yang peduli terhadap penyandang disabilitas kembali mendatangi DPRD Kota Yogya, Kamis (6/9). Untuk ketujuh kalinya mereka menagih raperda terkait penyandang disabilitas yang tidak kunjung ada titik temu penyelesaian. Raperda itu sudah masuk pembahasan sejak tahun 2016 namun hingga kini belum selesai.

"Kami masih ingat betul, pertama kali datang ke gedung DPRD Kota Yogya pada akhir 2014. Sampai sekarang yang ketujuh kalinya, aspirasi kami juga masih sama yakni kapan perda disabilitas ini diselesaikan," kata Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Arni Surwanti.

Kehadiran ratusan warga tersebut hanya ditemui oleh Ketua DPRD Kota Yogya Sujanarko, dan Wakil Ketua I M Ali Fahmi. Sedangkan anggota dewan yang lain tidak berada di kantor lantaran tengah menjalani masa reses yang baru akan berakhir Jumat (7/9) pagi.

Arni menjelaskan, keberadaan perda sangat dibutuhkan guna menjamin hak penyandang disabilitas. Aspirasi yang disampaikan tersebut bukan semata meminta prioritas pembahasan melainkan pihaknya saat ini tengah berupaya memperjuangkan kesetaraan hak bagi kaum terpinggirkan, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. "Karena ini adalah raperda inisiatif dewan, maka aspirasinya kami sam-

paikan ke dewan," tegasnya.

Perjalanan pembahasan raperda penyandang disabilitas sebelumnya cukup dinamis. Terutama setelah Biro Hukum DIY menyampaikan nota penolakan terhadap materi raperda pada tahun 2017 lalu. Penolakan itu didasarkan atas naskah raperda yang dinilai menjajak Undang-undang No 8 Tahun 2106 tentang Penyandang Disabilitas.

Arni mengaku, penolakan dari Biro Hukum DIY sempat mengagetkan komunitasnya. Hal ini lantaran dirinya bersama para elemen yang pe-

duli terhadap penyandang disabilitas pernah menguji naskah akademik yang cukup komprehensif. Naskah itu didasarkan atas permasalahan yang ada di Yogya berikut kebutuhan dan solusinya. Selain itu juga telah disesuaikan dengan hasil konvensi internasional. "Kalau memang dari materi ada masalah, kenapa tidak kembali pada draf yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Toh tinggal merubah beberapa pasal dan bab saja," tandasnya.

Ketua DPRD Kota Yogya Sujanarko, mengaku sudah meminta penjelasan secara resmi terhadap panitia khusus (pansus) pembahas raperda. Menurutnya, saat ini terdapat lima raperda yang belum ada kepastian penyelesaian, termasuk terkait penyandang disabilitas. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018, setiap raperda yang masuk dalam program harus bisa diselesaikan di tahun berjalan. (Dhi)-a



KR-Archis/Vahdan

Elemen warga peduli penyandang disabilitas menggelar aksi di sela penyampaian aspirasi di gedung DPRD Kota Yogya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Bag. Hukum	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. Din. Sosial	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

- untuk diketahui

Yogyakarta, ...
Plt. K...
Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005